



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020



Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten

 Pengadilan Negeri Pandeglang  info@pnPandeglang.go.id  pn-pandeglang.go.id

 Pengadilan Negeri Pandeglang  [pnpandeglang](https://www.instagram.com/pnpandeglang)  0812 8872 3614

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunianya , dengan berakhirnya tahun 2020 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tahun 2020. Alhamdulillah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pengadilan Negeri Pandeglang telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Pandeglang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang aktivitas Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas – tugasnya, baik yang menyangkut tugas yustisial maupun non yustisial termasuk didalamnya masalah-masalah yang dihadapi.

Selain itu gambaran lebih lanjut mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2020 serta sebagai pelaporan pokok-pokok program kerja untuk tahun 2020.

Dalam menyusun laporan ini , kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, namun kami memahami betul laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangannya, oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri, semoga kita tetap berada dalam lindungan dan tuntunannya, Aamiin ya Robbal Alamin.

Pandeglang, 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Dr. Ardi Wijayanto, S.H., M.Hum
NIP. 19760621 200012 1 005

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan.....	3
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	3
B. Penyelesaian Perkara.....	4
- Jumlah sisa perkara yang diputus.....	4
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	5
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya.....	6
hukum Banding, Kasasi dan PK.....	6
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	6
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui.....	7
Diversi.....	7
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	7
- Posbakum.....	7
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	8
- Perkara Prodeo.....	8
BAB III Sumber Daya Manusia.....	9
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/gol/pendidikan.....	10-11
- Mutasi.....	11
- Promosi.....	13
- Pensiun.....	14
- Diklat.....	14
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi..	15
A. Pengelolaan Keuangan.....	15
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	16-20
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	21
- Implementasi e-court.....	21
- Implementasi SIPP.....	22
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....	23

- Akreditasi Penjaminan Mutu.....	23
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	23
- Inovasi Pelayanan Publik.....	26
BAB VI Pengawasan.....	39
A. Internal.....	39
B. Evaluasi.....	40
BAB VII Penutup.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi.....	42-43

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Menyenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang

Dalam rangka melaksanakan Undang – undang yang diamanatkan tersebut maka Pengadilan Negeri Pandeglang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk tahun anggaran 2020 yang berisi, antara lain :

1. Laporan administrasi umum yaitu : Bidang Umum dan Keuangan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Laporan Administrasi Perkara (Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum).

Posisi Pengadilan Negeri dalam struktur satu atap dengan Mahkamah Agung menjadi tantangan ke depan yang harus dipikirkan dalam hal :

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum.
2. Memberikan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan.
4. Penegakan hukum secara merata dalam sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas Pengadilan mempunyai visi:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG”

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai misi, yaitu :

“Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan”. Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI, dengan mempertegas visi Mahkamah Agung, yakni: “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pandeglang telah menentukan rencana strategis. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

BAB II
PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Keadaan Perkara Di Tahun 2020 Pada Pengadilan Negeri Pandeglang Dapat Dilihat Secara Rinci Pada Tabel Berikut :

SATKER	PERKARA	SISA THN 2019	MASUK THN 2020	PUTUS THN 2020	SISA THN 2020	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2020	
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	45	317	290	27	80%
		Cepat	-	6	6	-	100%
		Anak	-	4	4	-	100%
		Pra Peradilan	-	1	1	-	100%
	Perdata	Gugatan	7	25	18	9	56%
		Permohonan	-	22	22	-	100%
		Gugatan Sederhana	-	31	31	-	100%
		Perlawanan/ Bentahan	-	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut Ini Rincian Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Negeri Pandeglang Di Tahun 2020

SATKER	PERKARA		SISA PERKARA THN 2019	SISA PERKARA THN 2019 YANG DIPUTUS THN 2020	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	45	45	100%
		Cepat	-	-	-
		Anak	-	-	-
		Pra Peradilan	-	-	-
	Perdata	Gugatan	7	7	100%
		Permohonan	-	-	-
		Gugatan Sederhana	-	-	-
		Perlawanan/ Bentahan	-	-	-

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2020

SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS THN 2020	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2020	
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	290	290	27	91,01%
		Cepat	6	6	-	100%
		Anak	4	4	-	100%
		Pra Peradilan	1	1	-	100%
	Perdata	Gugatan	18	10	8	56%
		Permohonan	17	17	-	100%
		Gugatan Sederhana	27	27	-	100%
		Perlawanan/ Bentahan	-	-	-	-

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGIJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK (Peninjauan Kembali) Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2020.

SATKER	PERKARA		JUMLAH PERKARA PUTUS THN 2020	JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2020 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2020 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2020 TIDAK MENGAJUKAN PK	
				JUM-LAH	PERSEN TASE	JUM-LAH	PERSEN TASE	JUM-LAH	PERSEN TASE
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	290	285	98%	287	97%	289	99%
		Anak	4	4	100%	4	100%	4	100%
	Perdata	Gugatan	18	12	66%	15	83%	18	100%

3. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2020.

SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI DI TH.2020	STATUS KEBERHASILAN DALAM MEDIASI			DALAM PROSES
		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
PN PANDEGLANG	32	1	31	-	-

3. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada pengadilan negeri pandeglang yang berhasil didiversi pada tahun 2020.

SATKER	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TH.2020	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIDIVERSI TH.2020	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI			DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
PN PANDEGLANG	4	-	-	-	-	-

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Pengadilan Negeri Pandeglang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI terhitung tanggal 16 Desember 2016 , Nomor : TAPM.060/QMR/Sertifikat/12/2016 Terakreditasi dengan nilai “ **B** “ , Dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pandeglang mendapatkan kembali Sertifikat Akreditasi Penjaminanan Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI terhitung tanggal 18 Juli 2017, Nomor TAPM 083/QMR/Sertifikat/7/2017 Terakreditasi dengan nilai “ **A** “ (Excellent), maka dengan adanya Sertifikat ISO Pengadilan Negeri Pandeglang akan lebih maju ditahun mendatang.

- POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah suatu layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum yang berupa informasi dan juga konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pandeglang (417845) mendapatkan alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jatramada yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan jumlah layanan sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) jam layanan, realisasi anggaran untuk Honor Advokat / Pengacara piket pada tahun anggaran 2020 tercapai **100%** (seratus persen).

- **SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU**

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Pandeglang tidak melaksanakan Sidang Keliling ataupun Pelayanan Terpadu.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pandeglang (417845) untuk Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Negeri Pandeglang tidak mendapat alokasi dana untuk pembiayaan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Gol
1.	Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.	Ketua / Hakim	IV.a
2.	Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi., M.Hum.	Wakil Ketua / Hakim	IV.a
3.	A r l y a n, S.H., M.H.	Hakim	III.d
4.	Anggi Prayurisman, S.H., M.H.	Hakim	III.c
5.	Ida Adriana, S.H.	Hakim	III.c
6.	Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.	Hakim	III.c
7.	Maria Krista U. Br. Ginting, S.H., M.Kn	Hakim	III.c
8.	Suluh Pardamaian, S.H., M.H.	Hakim	III.c
9.	Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H.	Hakim	III.c
10.	Ravita Lina, S.H., M.H.	Panitera	IV.a
11.	Dedi Irawan, S.H.	Panmud Pidana	III.d
12.	Yani Irawati, S.H., M.H.	Panmud Perdata	IV.a
13.	Elvi Hera, S.E., M.H.	Panmud Hukum	IV.a
14.	Z. Arifin	Panitera Pengganti	III.c
15.	Intan Febrianti, S.H.	Panitera Pengganti	III.c
16.	Frida Apriani, S.H.	Panitera Pengganti	III.c
17.	Nurul Iman, S.H.	Panitera Pengganti	III.d
18.	Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H.	Panitera Pengganti	III.c
19.	Nur Hidayah, S.H.	Panitera Pengganti	III.b
20.	Nenny Isfiany Sitohang, S.H.	Panitera Pengganti	III.b
21.	Joko Sulisty, S.H.	Panitera Pengganti	III.b
22.	Eleine Febriana, S.H.	Panitera Pengganti	III.c
23.	Maria Sakura, S.H.	Panitera Pengganti	III.c
24.	Indah Agustriana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III.c
25.	R. Dudi Darmaji, S.H.	Juru Sita	III.c
26.	Haesifin Berhayan	Juru Sita	III.b
27.	Matsani	Juru Sita Pengganti	II.b

Sumber daya manusia bidang Non Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Pandeglang

No	Nama	Jabatan	Gol
1.	Yayat Supriatna, S.H.	Sekretaris	III.d
2.	Elvis Reza Almany, S.T., S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III.c
3.	Ari Sulaeman, S.T.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III.c
4.	Sopian Badruzaman, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III.c
5.	Nita Yunita, S.H.	Staff Umum / Bendahara Pengeluaran	III.b
6.	Iis Setiawati, S.H.	Staff Umum	III.b
7.	Tapanuli Utara, A.Md	Staff Kepegawaian	III.a

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan pangkat / golongan adalah :

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina / IV.a	5
2.	Penata Tingkat I / III.d	4
3.	Penata / III.c	17
4.	Penata Muda Tingkat I / III.b	6
5.	Penata Muda / III.a	1
6.	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	1
JUMLAH		34

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan tingkat pendidikan adalah :

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata II	13
2.	Strata I	17
3.	Diploma III	1
4.	S M U	3
JUMLAH		34

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang Kenaikan pangkat tahun 2020 adalah :

No	Per April dan Oktober 2020	Jumlah
1.	1 Orang (Per April)	1
2.	2 Orang (Per Oktober)	2
JUMLAH		3

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang Kenaikan gaji berkala tahun 2020 adalah :

No	Tahun 2020	Jumlah
1.	13 Orang	13
JUMLAH		13

– **Mutasi**

Dalam tahun 2020, pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah terjadi mutasi keluar yaitu:

1. Windy Ratna Sari, SH Semula Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai hakim Pengadilan Negeri Tegal, Jawa Tengah
2. Dian Yuniati, SH., MH. Semula Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat
3. Arista Budi Cahyawan, SH., MH. Semula Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Metro, Lampung

4. Karolina Selfia br. Sitepu, SH., MH. Semula Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat
5. Nia Karnelia, SH., MH. Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang
6. Ubadilah, SH. Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang
7. Usye Sekarmanah Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung
8. M. Nanang Gunawan Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung
9. Tb. Hilman Warsakusuma Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung

10. Jefri Novirza, SH Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang
11. Ratri Kusuma Dewi A.A, SH. Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang
12. Pipin Perosanti, SH. Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang
13. Sumiati, SH. Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung
14. Katmiati, SH. Semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang

Dalam tahun 2020, pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah terjadi mutasi masuk yaitu:

1. Ravita Lina, SH., MH. Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mutasi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Yani Irawati, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang mutasi sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pandeglang
3. Arlyan, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang
4. Suluh Pardamaian, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang
5. Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH. Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Banten mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang
6. Ida Adriana, SH. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang
7. Madela Natalia Sai Reeve, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang
8. Titis Tri Wulandari, SH., S.Psi., Mum. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
9. Rosa Maulidyan, S.Sos., SH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang
10. Elvi Hera, SE., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang mutasi sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang
11. Maria Sakura, SH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang
12. Frida Apriani, SH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang
13. Indah Agustriana, SH., MH. Staf Pengadilan Negeri Jakarta Utara mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang
14. Joko Sulisty, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang

– **Promosi**

Promosi jabatan pada Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Eko Suharjono, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B, Jawa Barat
2. Yonathan Alexander Maruanaya, SH., MH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, Jawa Barat
3. Gartilan Marnaek, SH., MH. Staf Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, Papua
4. Mulyana, SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Serang

- **Pensiun**

Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang yang pensiun pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dadang Kurnia Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang pensiun per 1 Desember 2020
2. Sri Tinah Sudarlinah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang pensiun per 1 Desember 2020

- **Diklat**

Hakim / Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Anggi Prayurisman, SH., MH. Mengikuti pelatihan online tentang Teknik Menyusun Abstraksi Putusan Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Ravita Lina, SH., MH. Mengikuti pelatihan online tentang Training of Trainers pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
3. Maria Krista Ulina Ginting, SH., M.Kn.
 - Mengikuti pelatihan online tentang Coaching, Counseling dan Mentoring di Pengadilan pada masa sulit dari Tempat Tugas pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang

- Mengikuti pelatihan online tentang Era Baru Komunikasi Pengadilan dari Temat Tugas pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
- 4. Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH. Mengikuti pelatihan teknis tentang Penanganan Bukti Elektronik di Persidangan bagi Hakim Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, di Diklat Mahkamah Agung, Bogor, Jawa Barat
- 5. Ardhi Wijayanto, SH., M.Hum. Mengikuti Pelatihan Online Tentang tindak pidana korupsi(TIPIKOR) bagi hakim Peradilan Umum dan Militer pada masa sulit dari tempat tugas di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang

BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TAHUN 2020

No.	JENIS KEGIATAN	PAGU AWAL 2020	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE
1.	Layanan Dukungan Manajemen Peradilan	5.886.040.000	5.325.630.000		99,60%
2.	Gaji dan Tunjangan	4.621.448.000	4.052.636.000	4.032.923.852	99,51%
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.239.594.000	1.247.994.000	1.225.703.784	98,21%
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000	25.000.000	24.900.960	99,60%
5.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	31.200.000	100%
6.	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama	120.600.000	120.600.000	119.290.000	98,91%
	Total	6.003.784.000	5.477.430.000	5.434.018.596	99,20%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Adapun ruangan yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Sekretaris	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Hakim	2
6	Ruang Subbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	1
7	Ruang Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
8	Ruang Server	1
9	Ruang Perpustakaan	1
10	Ruang Arsip Hukum	3
11	Ruang Panitera Pengganti	1
12	Ruang Ramah Anak	1
13	Pantry	1
14	Ruang Subbag Umum dan Keuangan	1
15	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
16	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
17	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
18	Ruang Mediasi dan Diversi	1
19	Ruang Tahanan	3
20	Ruang Sidang	4
21	Ruang Saksi Anak	1
22	Ruang Laktasi	1
23	Ruang Barang Bukti	1
24	Ruang Kesehatan	1
25	Ruang Pos Bantuan Hukum	1
26	Ruang Tunggu Jaksa	1
27	Lobby	1
28	Ruang Tunggu Pengunjung	1
29	Musholla	1
30	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
31	Pojok E-Court	1

32	Ruang Tamu Terbuka	1
33	Gudang	2
34	Pos Satpam	1

Rumah dinas pada Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	KONDISI			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		√		
3	Rumah Dinas Panitera	1		√		
4	Rumah Dinas Hakim	9			√	

Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	Jumlah	Keterangan
1	Access Point	2 Unit	
2	CCTV	1 Unit(12 Titik)	
3	Facsimile	1 Unit	
4	Infocus	1 Unit	
5	Laptop/Notebook	18 Unit	
6	P.C Unit	52 Unit	
7	PABX	-	
8	Pesawat Telepon	2 Unit	
9	Printer	30 Unit	
10	Router	1 Unit	
11	Scanner	4 Unit	
12	Server	3 Unit	
13	Switch	12 Unit	
14	UPS Battery	6 Unit	
15	Wireless Access Point	8 Unit	
16	Mesin Ketik	2 Unit	
17	Rak Server	1 Unit	

18	Touch Screen	1 Unit	
----	--------------	--------	--

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	A.C. Split	33 Unit	
2	A.C. Window	-	
3	A.C. Central	2 Unit	
4	A.C. Portable	-	
5	Amplifier	-	
6	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	1 Unit	
7	Alat Pengaman/Sinyal	-	
8	Alat rumah tangga lainnya	-	
9	Alat rumah tangga lainnya (home use)	1 Unit	
10	Bangku Panjang Besi/Metal	17 Unit	
11	Bangku Panjang Kayu	16 Unit	
12	Bingkai foto	-	
13	Brandkas	2 Unit	
14	Buffet	-	
15	Camera Digital	1 Unit	
16	Digital Keyboard Technics/ Organ	-	
17	Dispenser	1 Unit	
18	Exhause Fan	-	
19	Filing Cabinet Besi	19 Unit	
20	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	
21	Genset	1 Unit	
22	Gordyn/Kray	1 Unit	
23	Jam Elektronik	5 Unit	
24	Jet Pump	-	
25	Kaca Hias	-	
26	Kasur / Spring bed	-	
27	Kipas Angin	2 Unit	
28	Kompore gas (alat dapur)	-	
29	Kursi Besi/Metal	133 Unit	
30	Kursi Kayu	34 Unit	
31	Lambang Garuda Pancasila	3 Unit	
32	Lambang Instansi	1 Unit	
33	Layar Film/Proyektor	-	

34	Lemari Besi/Metal	52 Unit	
35	Lemari Es	-	
36	Lemari Kayu	19 Unit	
37	Lensa Kamera	-	
38	Loudspeaker	-	
39	Meja Kerja Besi/Metal	-	
40	Meja Kerja Kayu	103 Unit	
41	Meja Komputer	7 Unit	
42	Meja makan kayu	1 Unit	
43	Meja Rapat	17 Unit	
44	Meja Resepsionis	-	
45	Mesin Absensi	2 Unit	
46	Mesin cuci	-	
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit	
48	Meubelair lainnya	-	
49	Microphone/wireless MIC	-	
50	Mimbar/Podium	-	
51	Overhead Projector	-	
52	Palu Sidang	-	
53	Papan Visual/Papan Nama	9 Unit	
54	Penyemprot tangan (hand sprayer)	-	
55	Rak Besi	19 Unit	
56	Rak Kayu	11 Unit	
57	Rak piring alumunium	-	
58	Rambu-rambu	-	
59	Sice	12 Unit	
60	Sirine	-	
61	Sound System	5 Unit	
62	Tabung gas	-	
63	Tangki Air	-	
64	Tape Recorder	1 Unit	
65	Televisi	-	
66	Tempat tidur kayu	-	
67	Tripod Kamera	-	
68	Troli	-	
69	White Board	13 Unit	

Kendaraan dinas pada Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kendaraan Roda Empat						
1	Toyota Kijang LSX	2003	√			
2	Toyota Kijang Innova	2008	√			
3	Toyota Fortuner	2019	√			Pinjam pakai dari Pemda Pandeglang
Kendaraan Roda Dua						
1	Suzuki Shogun 125 cc	2005		√		
2	Suzuki Shogun 125 cc	2005		√		
3	Suzuki Shogun 125 cc	2008		√		
4	Honda Mega Pro	2007		√		
5	Honda Mega Pro	2008		√		
6	Honda Mega Pro	2008		√		
7	Honda Mega Pro	2008		√		
8	Honda Mega Pro	2009		√		

Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2020 mendapatkan transfer masuk dari Mahkamah Agung berupa Alat Pengolah Data sebagai pendukung e-court dan e-litigasi yang berupa :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	P.C Unit	3 Unit	

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (417844) Pengadilan Negeri Pandeglang tahun anggaran 2020 terdapat belanja modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Laptop sebanyak 3 (tiga) unit, serta tidak terdapat penghapusan sarana dan prasana dalam tahun 2020.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

– **Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum**

Lahirnya aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-Court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak berperkara.

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah Pendaftaran Perkara Online (e-Filing), Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM), Pemanggilan Elektronik (e-Summons) dan Persidangan Online (e-Litigation).

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Court, hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 11 dari 30 perkara gugatan dan 1 dari 16 perkara permohonan telah menggunakan e-Court. Di samping itu, untuk mendukung penerapan e-Court pada Pengadilan Negeri Pandeglang, disediakan pula Pojok E-Court yang dapat difungsikan para pencari keadilan untuk keperluan e-Court.

Selain terdapat pojok e-Court, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Pandeglang juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Court, serta menjawab informasi e-Court secara keseluruhan.

– **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi ini di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk memperbaharui informasi perkara dengan mudah dan cepat.

Untuk memantau penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), secara umum penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan nilai rasio penanganan perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tanggal 31 Desember 2020 Pengadilan Negeri Pandeglang berada pada urutan 84 dengan rincian Nilai Kinerja sebesar 147,26 point, Nilai Kepatuhan sebesar 530,69 point, Nilai Kelengkapan sebesar 131,55 point, Nilai Kesesuaian sebesar 164,93 point dan nilai akhir Evaluasi Implementasi SIPP pada tanggal 31 Desember 2020 bernilai 974,43 point.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

– Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Pandeglang dilakukan oleh Tim Asessor Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tinggi Banten yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah dilakukan Asistensi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten akhirnya Pengadilan Negeri Pandeglang mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan nilai “A” (Excellent) sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Nomor : TAPM.083/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 terhitung tanggal 18 Juli 2017.

– Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan.

Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan pelayanan tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang dilaksanakan dengan prinsip Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas dan Aksesibilitas.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang terdiri dari empat petugas yang terdiri dari :

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana, yang memiliki tugas melayani :
 - Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, cepat /lalu lintas dari Penuntut Umum / Penyidik
 - Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
 - Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
 - Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan

- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana
2. Petugas Kepaniteraaran Muda Perdata, yang memiliki tugas melayani :
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa
 - Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana
 - Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
 - Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
 - Menerima Pendaftaran perkara permohonan
 - Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
 - Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan
 - Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi
 - Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi
 - Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
 - Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata
3. Petugas Kepaniteraaran Muda Hukum, yang memiliki tugas melayani :
- Permohonan pendaftaran pendirian CV
 - Permohonan waarmarking surat-surat
 - Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
 - Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset

- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- Permohonan pendaftaran surat kuasa
- Permohonan legalisasi surat
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
- Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pandeglang sudah menggunakan Aplikasi eraterang, hal ini dibuktikan dari total 43 pembuatan surat keterangan sebanyak 43 surat keterangan sudah menggunakan Aplikasi eraterang.

4. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang memiliki tugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pandeglang.

- **Inovasi Pelayanan Publik**

Dimulai Pada Tanggal 25 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Pandeglang Mengembangkan Beberapa Aplikasi Inovasi Untuk Pelayanan Publik Dan Juga Untuk Internal Pengadilan Negeri Pandeglang Diantaranya Adalah :

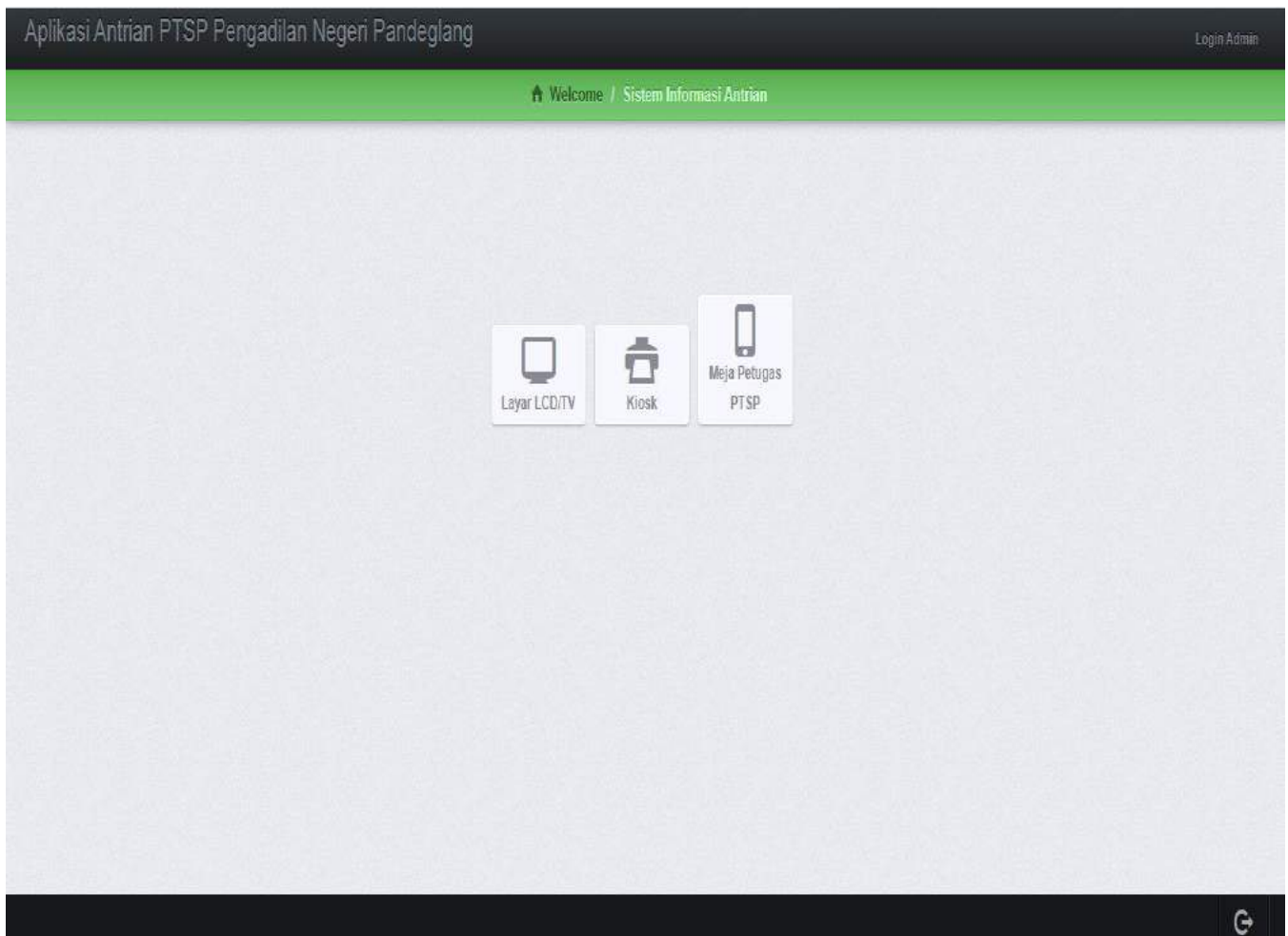
1. Antrian PTSP
2. Audio Anti Gratifikasi
3. Survei IKM
4. Info Perkara Dan Denda Tilang
5. Aplikasi QR Code E-Brosur Kepaniteraan, QR Code BMN dan QR Code SIKEP

1. Antrian PTSP

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pandeglang adalah aplikasi antrian untuk pengunjung pengadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum, perdata, pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pengunjung untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut.

I. Fitur Antrian PTSP

- Pengambilan nomor antrian
- Meja petugas PTSP
- Layar LCD/TV



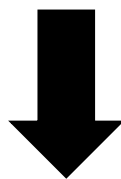
II. Alur Proses Antrian PTSP Dapat Dilihat Gambar Berikut :

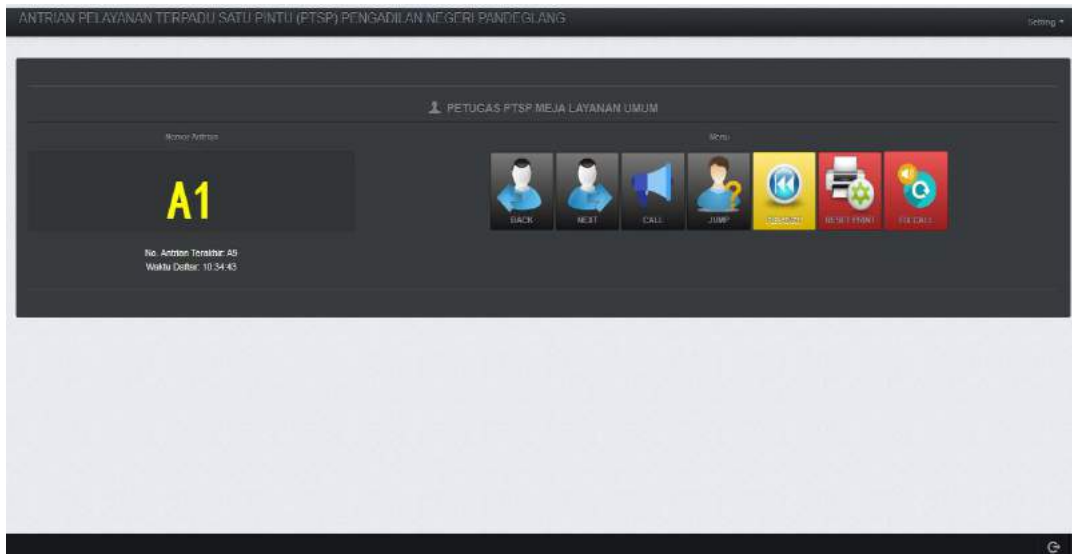


Mengambil No Antrian

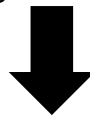


Login Petugas PTS





Panggil No Antrian



LCD No Antrian

2. Audio Anti Gratifikasi

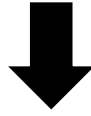
Audio Anti Gratifikasi Pengadilan Negeri Pandeglang Yaitu Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengumuman Audio Pengeras Suara Untuk Publik.

I. Fitur Audio Antri Gratifikasi

- Anti Gratifikasi.
- Memperingatkan Pengunjung Sidang Agar Tetap Menjaga Kebersihan di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang



II. Alur Proses Audio Anti Gratifikasi Dapat Dilihat Gambar Berikut :
Play Otomatis(2 Jam Sekali)



Play Otomatis(1 jam sekali)

3. Survei IKM

Survei IKM Pengadilan Negeri Pandeglang Yaitu Bertujuan Untuk Memberikan Penilaian bagi Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Pandeglang.

I. Fitur Survei IKM

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Data Masyarakat Responden (Spk)
- Data Masyarakat Responden (Sipk)

**PENGADILAN NEGERI
PANDEGLANG KELAS II**

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Kab. Pandeglang Propinsi Banten
Telp.(0253) 201125. Fax.(0253) 201125
e-mail: pnpandeglang@yahoo.co.id Website: pn-pandeglang.go.id

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Puaskah Anda Dengan Pelayanan di Kantor Kami?

Sangat Puas

Puas

Cukup

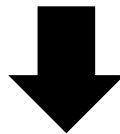
Tidak Puas

II. Alur Proses Survei Ikm Dapat Dilihat Gambar Berikut :

Survei IKM



Survei SIPK(Responden)

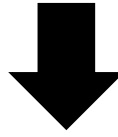


KUESIONER SURVEI PERSEPSI KORUPSI (SPK)
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II

- Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Tidak terdapat praktek pencalonan/perantara yang tidak resmi.
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Petugas pelayanan tidak diskriminatif
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta.
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju
- Tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan.
 Tidak Setuju Kurang Setuju
 Setuju Sangat Setuju

Register

Survei SPK(Responden)



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II**

1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

6. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (Hadiah)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

7. Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

8. Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

9. Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

10. Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)

Selalu Sering
 Jarang Tidak Ada

[Register](#)

4. Info Perkara Dan Denda Tilang

Info Perkara Dan Denda Tilang Pengadilan Negeri Pandeglang Yaitu Bertujuan Untuk Mempermudah Para Pencari Keadilan Mencari Informasi Perkara Jadwal Sidang dan Denda Tilang.

I. Fitur Info Perkara Dan Denda Tilang

- Mencari Info Perkara
- Mencari Info Tilang



II. Alur Proses Info Perkara Dan Denda Tilang Dapat Dilihat Gambar Berikut

:



Download Di Google Playstore



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Akses Penelusuran Informasi Perkara dan Denda Tilang

INFO TILANG

CARI DATA TILANG

Ketik Potongan Nama, No. register Tilang atau No. Polisi

Contoh: Sanusi, 254233, 1425 bg

Besar Kecil Huruf di Abaikan. Ketikkan potongan Nama, No. register Tilang atau No. Polisi jangan di gabung

Copyright 2020 By: IT Pengadilan Negeri Pandeglang

Cari Data Denda Tilang



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Akses Penelusuran Informasi Perkara dan Denda Tilang

INFO PERKARA

CARI DATA PERKARA

Ketik Potongan Nomor Perkara atau Para Pihak

Contoh: 15/pid.b/2019 atau Irwan

Besar kecil huruf diabaikan, ketik potongan no. perkara ATAU potongan nama saja jangan di gabung

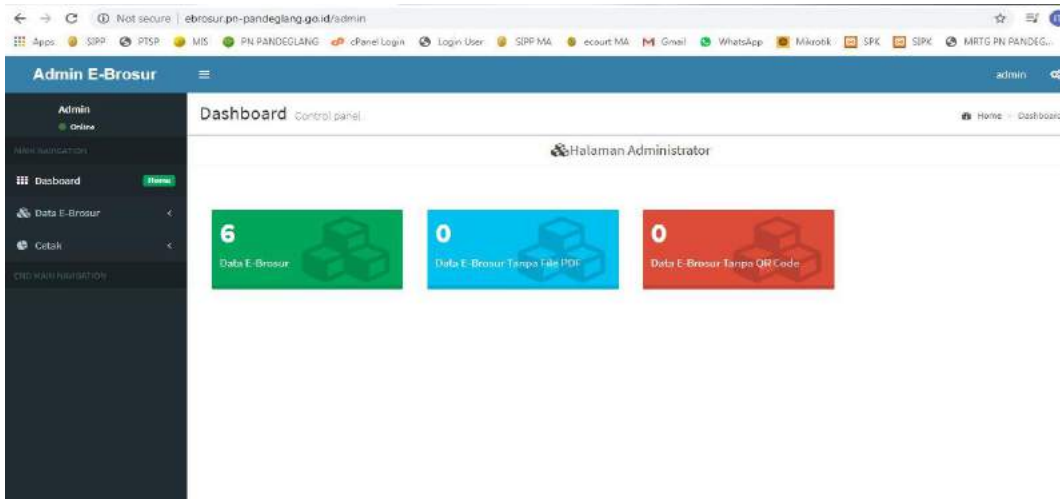
Copyright 2020 By: IT Pengadilan Negeri Pandeglang

Cari Data Perkara

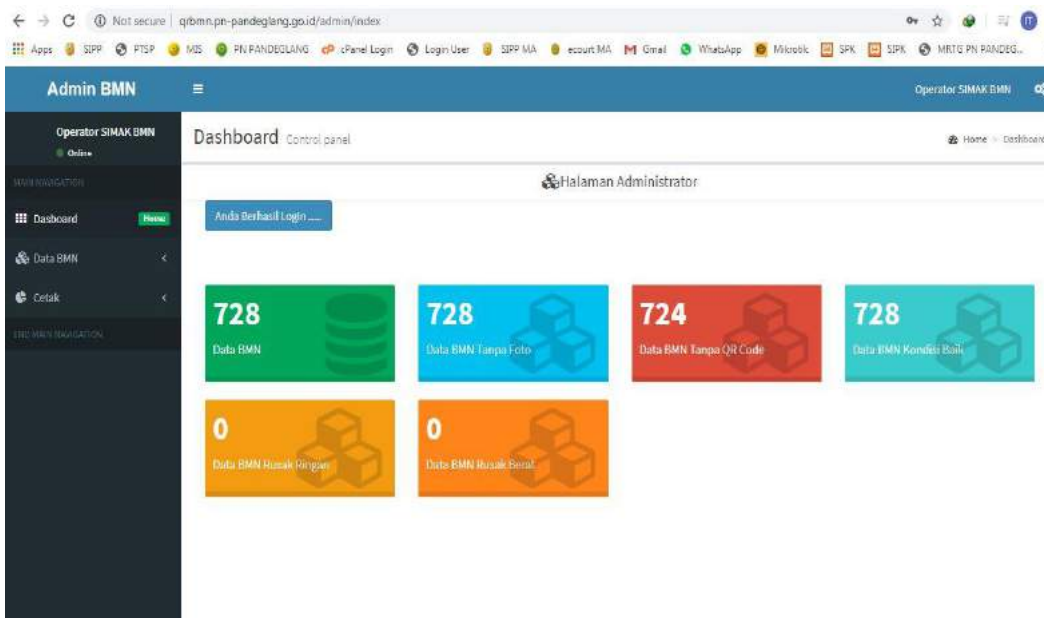
5. Aplikasi QR Code Sebagai Berikut:

- I. Aplikasi QR Code E-Brosur Kepaniteraan
- II. Aplikasi QR Code BMN
- III. Aplikasi QR Code SIKEP

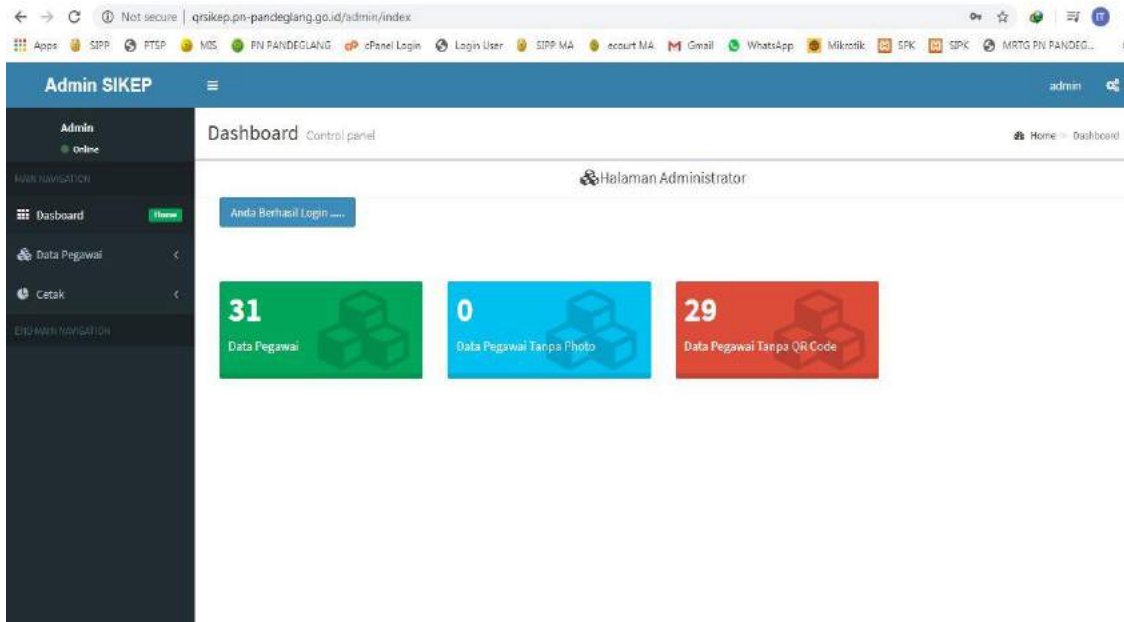
A. Aplikasi QR Code E-Brosur Kepaniteraan



B. Aplikasi QR Code BMN



C. Aplikasi SIKEP



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung dibawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Pandeglang melaksanakan pengawasan melekat dan fungsional yang telah dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera dan Sekretaris. Untuk hakim-hakim pelaksanaan pengawasan melekat pada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya, sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Pandeglang. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan pengawasan internal antara lain :

1. Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai

- Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- 2. Secara berkala dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jusrita / Jusrita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya
- 3. Secara berkala melakukan pemeriksaan / peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
- 4. Pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai
- 5. Secara berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya

B. Evaluasi

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang juga telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan setiap bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat bulanan yang membahas kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.

Hasil evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Panitera Pengganti yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Adanya Jabatan Panitera Muda Hukum yang belum terisi dan hanya di isi oleh seorang Pelaksana tugas

3. Kurangnya Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Pandeglang
4. Belum adanya Rumah Genset di Pengadilan Negeri Pandeglang
5. Pengadilan Negeri Pandeglang membutuhkan Staf Pelaksana dibidang IT agar implementasi SIPP, e-court dan e-litigasi bisa berjalan dengan maksimal
6. Masih banyak rumah dinas yang rusak berat dan harus segera diperbaiki
7. DIPA yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga dana operasional kegiatan kantor bisa tercukupi.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas
2. Pengadilan Negeri Pandeglang telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan semestinya
4. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, E-Court dan Era Terang
6. Peningkatan mutu menuju profesionalisme bagi karyawan dan karyawan Pengadiln Negeri Pandeglang telah dilaksanakan, dengan cara mengikuti pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi dan juga dengan cara mengikut sertakan pendidikan dan latihan serta penataran-penataran yang diadakan oleh pusdiklat Mahkamah Agung RI maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Departemen Keuangan

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja, maka diperlukan :

1. Penambahan pegawai staf pelaksana dan juga tenaga honorer

2. Adanya pembinaan sumber daya manusia dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan atau pelatihan agar dalam melaksanakan tugas
3. pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik
4. Penambahan alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
5. Supaya mengusulkan anggaran perbaikan / renovasi rumah dinas hakim pada tahun anggaran yang akan datang karena sudah banyak yang hancur / rusak berat